



Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Ekowisata

Local Communities Participation in Ecotourism Development

Kaharuddin^{1*}, Satyawan Pudyatmoko¹, Chafid Fandeli¹, & Wisjnu Martani²

¹Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281

²Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281

Email: kahar.ugm@gmail.com

HASIL PENELITIAN

Riwayat Naskah :

Naskah masuk (received): 14 Maret 2019

Diterima (accepted): 25 Februari 2020

KEYWORDS

participation, local communities, ecotourism, community forestry

ABSTRACT

The community forest Mandiri Kalibiru manages of protected forests one of activities is ecotourism management. The involvement of local communities as ecotourism actors is a major feature in the service business. This study aims to present the type of local communities participation in developing ecotourism, and the role of HKM institution in encouraging the local communities to participate in ecotourism. The concept of participation at the planning, implementation and utilization level is illustrated in three periods of tourism development: the first period-pioneering, the second-developing and the third-developed. Data collection uses in-depth interview techniques and document review. Data analysis was performed descriptively and theoretical propositions. There are differences in local communities participation in the three periods. Participation in the planning level is very dependent on the companion during periods 1 and 2, but when the third period, the planning can be done independently. Participation in the implementation level in periods 1 and 2 was carried out cooperatively, but in the third period, the implementation of the development uses professional staff. Participation in utilization rates began in the second period involving limited HKM members and youth leaders, and the 3rd period the Kalibiru community involved took advantage of work and business opportunities which reached 85%. The high local communities participation is inseparable from the role of partners, government and HKM institutional regulations in facilitating and providing of participating space for local communities.

KATA KUNCI

partisipasi, masyarakat lokal, ekowisata, hutan kemasyarakatan

INTISARI

Kelompok tani hutan kemasyarakatan (HKM) Mandiri Kalibiru mengelola hutan lindung yang salah satu kegiatannya berupa usaha pengelolaan ekowisata. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi pelaku wisata merupakan ciri menonjol dalam usaha jasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan jenis partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan ekowisata, dan peran kelembagaan HKM dalam mendorong masyarakat lokal berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata. Konsep partisipasi level perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan digambarkan pada tiga periode perkembangan obyek wisata: periode ke-1 perintisan, periode ke-2 mulai berkembang dan periode ke-3 berkembang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*indept interview*) dan kajian

dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan proposisi teoritis. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat lokal pada ke tiga periode perkembangan obyek wisata tersebut. Partisipasi level perencanaan sangat bergantung pada pendamping selama periode ke-1 dan 2, namun ketika obyek wisata sudah berkembang perencanaan mampu dilakukan secara mandiri. Partisipasi level pelaksanaan pada periode ke-1 dan 2 dilakukan secara gotong royong, namun pada periode ke-3 pelaksanaan pembangunan menggunakan tenaga profesional. Partisipasi level pemanfaatan dimulai pada periode ke-2 yang melibatkan anggota HKM dan tokoh pemuda secara terbatas, dan pada periode ke-3 masyarakat Kaliburu yang memanfaatkan peluang kerja dan usaha mencapai 85%. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut tidak lepas dari peran pendamping, pemerintah dan aturan lembaga HKM dalam fasilitasi dan penyediaan ruang partisipasi bagi masyarakat lokal.

© Jurnal Ilmu Kehutanan -All rights reserved

Pendahuluan

Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pemerintah, tahun 2015 menduduki urutan keempat penyumbang devisa nasional sebesar 12 juta USD dan menciptakan lapangan kerja sebesar 9,8 juta atau sebesar 8,4% (Anonim 2017; Ratman 2016). Di tingkat mikro masih diragukan adanya korelasi antara besaran perolehan devisa tersebut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kondisi tersebut disebabkan oleh struktur industri pariwisata yang bersandar pada mekanisme pasar dalam pengadaan modal infrastruktur yang membatasi partisipasi masyarakat lokal untuk memanfaatkan keuntungan pariwisata (Damanik 2013). Model pengembangan pariwisata yang lebih menekankan pada pendapatan dan pertumbuhan tidak jarang menjadikan masyarakat lokal terpinggirkan dalam pengelolaan wisata. Ekowisata lahir sebagai wujud protes terhadap model pengembangan pariwisata massal dengan menitikberatkan pada konservasi lingkungan, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, dan pemberdayaan kelompok rentan (Cobbinah 2015). Partisipasi merupakan hal penting masyarakat agar dapat memperoleh manfaat dalam pengembangan ekowisata (Damanik 2013; Moscardo et al. 2017). Secara konseptual ekowisata sangat sesuai dikembangkan oleh masyarakat lokal yang ditandai dari beberapa alasan, yaitu pertama, obyek dan atraksi wisatanya berskala kecil sehingga lebih mudah diterima dan diorganisasi oleh masyarakat;

kedua, partisipasi dan kepemilikan bagi masyarakat lokal; ketiga keuntungan pengelolaan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat selaku pengelola wisata. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan ekowisata berbasis komunitas adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Obyek wisata yang dikembangkan dengan memperoleh dukungan dari masyarakat merupakan jaminan keberlanjutan pembangunan wisata sekaligus dapat meningkatkan mutu pengalaman wisatawan (Damanik 2013; Nasikun 2000; Wood 2002). Pendekatan partisipatif memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan lebih seimbang dari pengembangan pariwisata (Tosun 2000). Namun demikian, disini yang berbeda Blackstock (2005) melihat 3 kegagalan pariwisata berbasis masyarakat meliputi cenderung mengambil pendekatan fungsional untuk keterlibatan masyarakat, cenderung memperlakukan masyarakat tuan rumah secara homogen; dan mengabaikan kendala struktural untuk kontrol lokal.

Kajian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata yang dilakukan selama ini lebih banyak mengungkap keterlibatan masyarakat dari golongan yang memiliki modal, akses keuangan dan keterampilan, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan masyarakat swasta pelaku industri wisata (Blackstock 2005, Cruz

et al. 2005, Idajati et al. 2015, Setiawan et al. 2017). Kajian yang memfokuskan pada partisipasi masyarakat kelompok tani pengelola hutan dalam mengembangkan ekowisata masih jarang dilakukan. Hal ini penting, mengingat data Bank Dunia (2006) menunjukkan terdapat 50-60 juta orang penduduk yang hidup di dalam kawasan hutan Indonesia dan 20% diantaranya termasuk kategori miskin. Ditingkat lokal, data KPH Yogyakarta tahun 2013 menunjukkan 30% penduduk miskin di Kecamatan Kokap, Kulonprogo tergantung pada hutan. Sementara di Dusun Kalibiru terdapat 61% rumah tangga termasuk kategori miskin dan rentan miskin (Aji et al. 2015). Masyarakat sekitar hutan dengan latar belakang petani memiliki karakteristik yang resisten terhadap perubahan, kurang inovatif, kurang mampu mengantisipasi masa depan, dan konsumtif (Purba 2005). Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekowisata di kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat petani hutan.

Pengembangan ekowisata di Kalibiru Kulonprogo merupakan bagian dari pengembangan hutan kemasyarakatan yang dipelopori oleh kelompok HKM Mandiri. Menurut Maryudi dan Krott (2012) pengembangan hutan kemasyarakatan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, bahkan sebaliknya mengurangi akses masyarakat. Keengganan pemerintah memberikan ruang akses yang memadai bagi masyarakat dan lebih menekankan alasan teknis dan profesionalisasi menjadi hambatan partisipasi masyarakat (Lund 2015; Maryudi & Krott 2012; Maryudi 2014). Pengembangan ekowisata oleh masyarakat pengelola hutan diprediksi menghadapi hambatan yang lebih besar dari pada implementasi program hutan kemasyarakatan yang umumnya berbasis lahan dan hasil hutan non kayu. Perbedaan langgam kerja bertani dengan wisata menjadi salah satu hambatan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata. Masyarakat sekitar hutan umumnya merupakan masyarakat agraris yang dilakukan secara turun temurun dan melembaga dalam kehidupannya (Maryudi & Nawir 2017). Banyak daerah pedesaan dan hutan yang memiliki potensi obyek dan daya tarik wisata yang tinggi, namun belum dikembangkan atau kondisi

wisatanya tidak berkembang. Disisi lain seringkali juga dijumpai obyek wisata yang sudah berkembang, namun keterlibatan masyarakat sekitarnya sangat terbatas dan kurang mendapatkan manfaat. Tosun (2000) menyebutkan tiga jenis hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wisata meliputi hambatan operasional, hambatan struktural dan hambatan budaya. Hambatan paling besar bagi masyarakat dalam pengembangan ekowisata meliputi penghalang struktural antara lain tidak adanya sistem yang tepat untuk mendorong partisipasi masyarakat, kapasitas orang miskin yang rendah, dan kurangnya sumber daya keuangan (Dogra & Anil 2012). Meskipun demikian kasus pengembangan ekowisata di Kalibiru berbeda dengan kondisi tersebut. Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) mampu mengembangkan ekowisata di kawasan hutan yang melibatkan sebagian besar warga Dusun Kalibiru. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana Kelompok Tani HKM mampu mendorong masyarakat Kalibiru berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan konsep partisipasi yang terdiri dari 3 jenis yaitu partisipasi level perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Ketiga jenis partisipasi tersebut didasarkan pada pendapat Damanik (2013), Maryudi et al. (2012) dan Prabhakarana et al. (2014). Menurut Damanik (2013) dan Prabhakarana et al. (2014), masyarakat hanya dapat memperoleh manfaat dari ekowisata ketika mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan dan pembagian hasil. Sementara itu, Maryudi et al. (2012) menjelaskan partisipasi dari praktek pengembangan hutan kemasyarakatan yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kegiatan kehutanan. Praktik-praktik tersebut membutuhkan ruang otonomi bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam penetapan tujuan, kontrol dalam pengelolaan dan pemanfaatan, kepemilikan manfaat dari hutan (Sikor et al. 2013; Maryudi 2017). Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan tujuan makalah ini yaitu menguraikan jenis partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekowisata, dan peran kelembangan HKM dalam

mendorong masyarakat Kalibiru berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini menyelidiki fenomena bagaimana Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) Mandiri Kulonprogo mendorong masyarakat Dusun Kalibiru berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata. Penyelidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata yang terdiri dari (1) Partisipasi terhadap perencanaan yang menguraikan proses awal pengambilan keputusan, proses penyusunan rencana desain wisata dan peran dalam sosialisasi rencana, (2) Partisipasi tahap pelaksanaan mencakup uraian partisipasi dalam pencarian pendanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, (3) Partisipasi dalam pemanfaatan menjelaskan tentang bentuk pemanfaatan peluang kerja dan usaha. Jenis partisipasi tersebut dilihat pada 3 masa perkembangan obyek wisata yaitu periode perintisan, pertengahan ketika mulai berkembang dan ketika obyek wisata sudah berkembang. Disisi lain dilakukan juga penelusuran peran lembaga HKm dan pihak lain dalam mendorong masyarakat Kalibiru berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata khususnya terkait aturan mainnya.

Pengumpulan data dilakukan bulan September 2017 - Juni 2018 dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indept interview*) dan kajian dokumen. Wawancara mendalam (*indept interview*) dilakukan untuk mengumpulkan data-data terkait jenis partisipasi dan peran lembaga HKm dalam mendorong partisipasi dalam pengelolaan ekowisata. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *snowball* yaitu pemilihan informan secara berantai hingga ditemukan informan lanjutan yang layak dijadikan responden. Informan yang dipilih adalah mereka yang memahami proses pembangunan HKm dan ekowisata, terlibat aktif dalam pengelolaan ekowisata yang meliputi pengurus HKm, anggota HKm pelaku wisata, dan pemuda pelaku wisata. Penelusuran data sekunder terhadap dokumen-dokumen tertulis dimaksudkan untuk menambah bukti dan verifikasi terhadap data hasil wawancara. Jenis data sekunder yang dimaksud antara lain profil pelaku wisata, profil masyarakat Dusun Kalibiru, profil ekowisata Kalibiru, dan

struktur organisasi HKm beserta aturan mainnya serta data-data lain yang terkait.

Analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan proposisi teoritis. Analisis deskriptif mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan suatu kasus, sementara analisis yang mendasarkan pada proposisi teoritis membandingkan fakta lapangan dengan proposisi yang diprediksikan. Apabila kedua hal tersebut terdapat kesamaan maka dapat menguatkan validitas studi kasus tersebut (Yin 2015). Proposisi yang diprediksikan yaitu pengembangan ekowisata melalui mekanisme lembaga kelompok tani tidak hanya mampu mendorong partisipasi anggota kelompok tetapi juga masyarakat di luar kelompok khususnya masyarakat Dusun Kalibiru. Analisis deskriptif menguraikan bentuk partisipasi masyarakat terkait gambaran kelembagaan, proses partisipasi dan penempatan karyawan berdasar ruang dan waktu serta karakter sosial ekonominya.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kalibiru

Masyarakat Kalibiru telah menggarap lahan hutan untuk pertanian sudah berlangsung jauh sebelum Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) terbentuk. Masyarakat mengelola lahan hutan dengan sistem kontrak 2 tahun, namun mereka merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut karena keterbatasan waktu kelola, kepastian lahan dan hasil yang diterima tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Awal reformasi tahun 1999-2000 semakin banyak masyarakat menggarap lahan hutan yang menyebabkan kondisi hutan menjadi terbuka dan kritis yang dapat memicu bencana alam. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan dari kalangan aktivis LSM Yayasan Damar untuk mencari solusi memulihkan kondisi hutan dengan mendorong perubahan pengelolaan hutan melalui pembangunan hutan kemasyarakatan. Yayasan Damar memfasilitasi berdirinya Kelompok HKm Mandiri Kalibiru melalui musyawarah anggota kelompok tani ternak pada tanggal 25 Desember 2001. Awal tahun 2003 HKm Mandiri Kalibiru memperoleh Ijin Sementara pengelolaan hutan dan

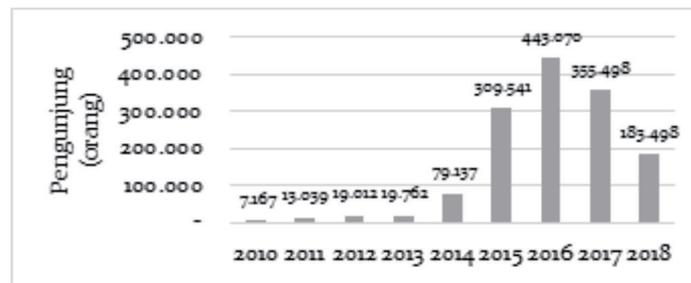
akhir tahun 2007 memperoleh ijin tetap (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) Nomor 452/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 untuk jangka waktu 35 tahun dengan luas areal 29 Ha (Anonim 2013).

Jumlah anggota HKM Mandiri Kalibiru tahun 2016 sebanyak 103 orang meliputi Blok I sebanyak 16 orang, Blok II 18 orang, Blok III 10 orang, Blok IV 12 orang, Blok V 14 orang, Blok VI 13 orang dan Blok 7 sebanyak 20 orang. Anggota HKM berumur rata-rata 61 tahun, sementara mereka yang menjadi pengelola wisata rata-rata berumur 58 tahun. Tingkat pendidikan anggota HKM sebagian besar (74%) SD, sekolah menengah 22% dan perguruan tinggi 4 %. Rata-rata kepemilikan lahan garapan (andil) seluas 3600 m² (Anonim 2016; Kaharuddin & Satyawan 2016; Data 2018).

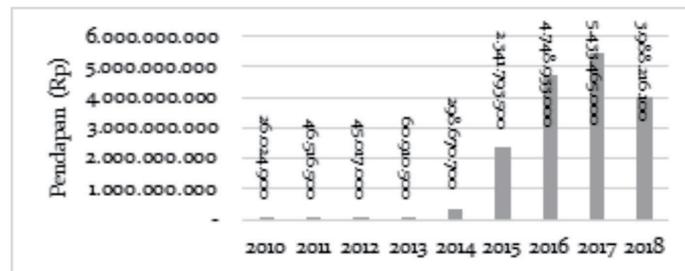
Kegiatan yang dilakukan oleh anggota HKM pada periode awal HKM (1999-2007) meliputi kelola kawasan hutan, kelola lembaga dan kelola usaha. Kelola kawasan hutan meliputi reboisasi lahan dengan tanaman pokok jati dan mahoni, jenis tanaman buah-buahan/MPTS (*Multiple Purpose Trees Species*) dan juga pertanian tanaman semusim berupa jagung, ketela, umbi-umbian, rumput dan tanaman empon-empon. Kelola lembaga dengan skema koperasi berupa pelatihan, studi banding, pengurusan ijin kelola hutan bersama pendamping, pembuatan rencana umum dan operasional serta pembuatan aturan internal. Kelola usaha masih terbatas pada kegiatan simpan pinjam dan ternak. Usaha wisata baru dikembangkan sekitar tahun 2008 setelah mendapat bantuan dana pembangunan wisata dari pemerintah propinsi DIY (Aji 2015; Anonim 2016; Kaharuddin & Satyawan 2016).

Ide pengembangan wisata berawal ketika anggota HKM mengetahui terjadi perubahan status kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung sekitar tahun 2007. Sesuai aturan, masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan pertanian di kawasan hutan karena tidak sesuai dengan fungsi hutan lindung. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat karena sudah mengeluarkan banyak *effort* dalam proses reboisasi lahan, penataan kelembagaan dan pengurusan izin HKM dengan

harapan dapat mengelola hutan untuk kegiatan pertanian dan memperoleh manfaat hasil kayunya. Ditengah gejolak internal, memunculkan pemikiran untuk mencari bentuk pengelolaan yang sesuai fungsi hutan lindung. Pengembangan ekowisata dianggap sebagai pilihan terbaik dan prospektif yang memungkinkan dikembangkan di hutan lindung Kalibiru dengan segala potensi yang dimiliki. Keputusan tersebut kurang mendapat respon bahkan dinilai negatif dari anggota HKM. Guna mencegah konflik dan perilaku pengelolaan hutan yang destruktif, dibuat kebijakan “jangka benah” pengelolaan hutan. Anggota HKM diberi kesempatan mengelola lahan hutan untuk pertanian, disamping mengembangkan tanaman empon-empon, tanaman buah, dan pemberian bantuan ternak. Ditengah proses tersebut dilakukan juga sosialisasi dan upaya pengembangan ekowisata dengan bantuan pendamping. Tahun 2008 HKM Kalibiru mendapat bantuan dana *Community Development* dari pemerintah propinsi untuk pembangunan ekowisata. Berawal dari bantuan tersebut HKM Mandiri Kalibiru terus berproses mengembangkan ekowisata dan tahun 2014 ditetapkannya menjadi Juara 1 nasional Wana Lestari oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wiratno 2017). Pengelolaan ekowisata Kalibiru mendapat sambutan yang positif dari wisatawan sejak diluncurkan tahun 2010. Jumlah kunjungan rata-rata pertahun (2010-2018) sebanyak 158.860 orang dan telah menyumbang pendapatan sebesar Rp. 1.891.062.590/ tahun. Adapun jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan secara lengkap per tahun terdapat pada Gambar 1 dan 2. Jumlah pengunjung terbanyak pada tahun 2016 (443.070 orang) sedangkan pendapatan tertinggi dicapai tahun 2017 sebesar Rp. 5,4 milyar (Anonim 2018). Pendapatan tersebut berasal dari 2 sumber utama yaitu tiket masuk pengunjung dan atraksi spot foto berbayar yang banyak diminati pengunjung. Kehadiran obyek-obyek wisata berbasis foto selfi di sekitar Kalibiru mulai dikembangkan masyarakat tahun 2017. Posisi obyek wisata Kalibiru pada saat itu secara kelembagaan, fasilitas dan pendanaan sudah berkembang dan sulit diikuti oleh obyek lain tanpa dukungan pihak ketiga.



Gambar 1. Jumlah Pengunjung obyek wisata Kalibiru 2010-2018
Figure 1. Visitor number of Kalibiru tourism object 2010-2018



Gambar 2. Jumlah pendapatan obyek wisata Kalibiru 2010-2018
Figure 2. Income number of Kalibiru tourism object 2010-2018

Secara kelembagaan pengelolaan ekowisata pada awalnya masih menyatu dengan pengurus HKM, baru sekitar tahun 2010 dibentuk seksi kegiatan wisata setelah ada perekrutan terbatas karyawan wisata dari tokoh-tokoh pemuda. Setelah pengunjung dan pendapatan terus meningkat, tahun 2016-2017 seksi wisata menjadi unit usaha HKM yang mandiri dengan sistem administrasi yang terpisah dengan administrasi HKM (Anonim 2016; Wawancara Pengurus HKM/Parjan 2018).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata

Perkembangan obyek ekowisata Kalibiru dilihat dari proses pembangunan obyek, tingkat kunjungan dan pendapatan dapat dibagi menjadi 3 periode yaitu periode ke-1 perintisan (*pioneering*), periode ke-2 mulai berkembang (*developing*) dan periode ke-3 sudah berkembang (*developed*). Periode perintisan tahun 2007-2009 ditandai dengan ide mengembangkan ekowisata, pembangunan fasilitas dasar dan belum ada kunjungan. Periode ke-2 mulai berkembang (2010-2013) ditandai dengan penambahan fasilitas, jumlah pengunjung masih sedikit (rata-rata 14.745 orang/tahun) dan pendapatan juga terbatas (rata-rata Rp 45 juta/tahun). Periode ke-3 berkembang (2014-2018)

dicirikan penambahan fasilitas atraksi wisata yang profitable, jumlah pengunjung meningkat (rata-rata 274.151 orang/tahun) dan pendapatan yang besar (rata-rata Rp. 3,4 milyar/tahun). Pembagian tingkat perkembangan obyek wisata tersebut mengacu pada prinsip model siklus hidup kawasan wisata (*Tourism Area Life Cycle=TALC*) dari Butler (2011) namun jenis parameter dan tingkatannya disederhanakan. Model TALC menganalogikan obyek wisata seperti sebuah produk yang memiliki kehidupan terbatas dari pengenalan, pertumbuhan, kematangan dan kemunduran (McKercher 2005). Jenis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berbeda-beda pada berbagai tingkat perkembangan obyek wisata tersebut. Berikut diuraikan jenis partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan ekowisata meliputi partisipasi pada level perencanaan ekowisata, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ekowisata dan partisipasi dalam pemanfaatan.

Partisipasi level perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ekowisata memuat uraian tentang dukungan terhadap ide pengembangan wisata, keterlibatan dalam proses penyusunan rencana desain wisata dan peran dalam sosialisasi rencana. Pengembangan

ekowisata diakui oleh kelompok tani HKM Kalibiru sebagai keterpaksaan akibat perubahan status kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung yang berimplikasi pada bentuk pemanfaatan hutan. Perubahan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi anggota HKM karena kegiatan pertanian dan harapan memungut hasil hutan kayu sebagai tujuannya, telah dilarang karena tidak sesuai dengan fungsi hutan lindung. Kondisi tersebut mengharuskan mereka untuk mencari bentuk pemanfaatan hutan lindung yang sesuai dengan potensi dan pilihan yang memungkinkan adalah pengembangan wisata alam. Ide pengembangan wisata tersebut merupakan hasil diskusi antara beberapa pengurus HKM dengan pendamping ditengah situasi internal HKM yang kurang baik. Langkah selanjutnya setelah keputusan tersebut adalah menyusun rencana desain pengembangan wisata. Perencanaan awal diarahkan untuk mengembangkan potensi pemandangan dengan latar belakang waduk Sermo dengan merancang sarana fasilitas wisata, aktivitas permainan dan sarana pendukung berikut penyusunan proposal rencana pendanaan. Proses penyusunan rencana dibahas secara terbatas antara pendamping dengan beberapa orang pengurus HK, karena penerimaan anggota HKM terhadap ide pengembangan wisata masih rendah. Ide dan bentuk desain pengembangan wisata lebih banyak berasal dari pendamping. Keterlibatan anggota HKM terbatas pada kehadirannya dalam sosialisasi ide dan desain rencana pengembangan wisata. Kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara khusus, tetapi menumpang pertemuan rutin atau kegiatan lain dari HKM. Sosialisasi dilakukan oleh pendamping dan nara sumber dari instansi pemerintah dan lembaga lain, untuk meredakan konflik internal dan kekecewaan anggota HKM.

Perencanaan pada periode ke-2 (2010-2013) ketika obyek wisata mulai berkembang (2010-2013), prosesnya mirip dengan periode perintisan, rencana pengembangan fasilitas, sosialisasi dan penyusunan proposal pendanaan masih menjadi prioritas. Hanya saja ditambahkan prioritas rencana mendatangkan wisatawan yang didesain melalui penyusunan proposal kerjasama kegiatan pelatihan dan outbond dari instansi-instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Peran pendamping masih dominan mewarnai

proses tersebut, sementara peran pengurus HKM lebih pada posisi rekan diskusi dan anggota HKM sebagai sasaran sosialisasi rencana pengembangan dan pelaksanaan. Besarnya peran pendamping pada dua periode tersebut dapat dimaklumi karena pengurus HKM memiliki keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan perencanaan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Soetomo (2015) bahwa pendampingan harus disesuaikan dengan kapasitas lembaga. Lembaga yang kapasitasnya lemah, memerlukan proporsi pendampingan yang lebih besar dengan menggunakan pendekatan asistensi. Dukungan anggota HKM terhadap pengembangan ekowisata sudah mulai meningkat karena adanya bukti program wisata mampu mendatangkan kegiatan dalam bentuk proyek pembangunan fasilitas dan wisatawan meskipun jumlahnya masih sedikit.

Perencanaan pada periode ke-3 (2014-2018) ketika obyek wisata sudah berkembang dengan jumlah pengunjung dan pendapatan yang meningkat terjadi perubahan proses penyusunan rencana. Ide dan bentuk kegiatan pengembangan berasal dari pengurus HKM dan anggota pengelola wisata. Peran pendamping bergeser dari asistensi menjadi konsultan lepas dan jenis pendampingnya tidak hanya dari lembaga LSM tetapi juga perorangan profesional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kapasitas lembaga HKM sudah meningkat berkat pengalaman dari proses belajar selama periode 1 dan 2. Dukungan pendanaan lembaga HKM yang kuat (3,4 milyar/tahun) sehingga tidak memerlukan lagi proses pencarian dana dari eksternal turut mempengaruhi kemandirian perencanaan. Desain pengembangan wisata difokuskan pada pengembangan fasilitas atraksi yang profit (misal desain fasilitas spot foto dan sarana *outbond*), perekrutan karyawan, penataan organisasi ekowisata, dan integrasi pengembangan fasilitas dalam kawasan hutan dengan wilayah sekitarnya. Mekanisme penyusunan rencanapun berbeda dengan proses pada periode 1 dan 2. Forum pertemuan yang dihadiri oleh pengurus HKM, pengurus ekowisata, anggota HKM dan karyawan wisata dimanfaatkan untuk menggali, merancang dan sosialisasi ide-ide pengembangan. Hasil dari pertemuan tersebut selanjutnya difinalisasi oleh pengurus HKM dan pengelola wisata, sementara

rencana kegiatan yang membutuhkan bantuan dalam implementasi terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pendamping/konsultan.

Menurut Slamet (1989) terdapat 4 tingkatan keterlibatan dalam perencanaan yaitu kemampuan mendefinisikan situasi yang menghendaki adanya suatu keputusan; memilih alternatif yang paling sesuai; menentukan strategi; dan menilai akibat dari keputusan, dan tindakan. Berdasarkan kriteria tersebut, partisipasi masyarakat Kalibiru dalam proses perencanaan pada periode 1 dan 2, baru pada tataran kemampuan mendefinisikan latar belakang kenapa wisata dikembangkan. Periode ke-3, perencanaan yang dikembangkan masyarakat berubah menjadi bottom up yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan pandangannya melalui prioritas dan strategi pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Proses perencanaan tersebut, jika dikaitkan dengan model partisipasi Shier (2001) termasuk dalam partisipasi yang mendukung dan memperhitungkan pandangan anggota serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Proses tersebut terlihat dalam rencana pengembangan spot foto yang diinisiasi dan dirancang oleh pemuda Kalibiru dan menjadi icon ekowisata Kalibiru.

Partisipasi level pelaksanaan

Partisipasi pada level pelaksanaan merupakan implementasi dari rancangan yang disusun pada level perencanaan, meliputi proses pencarian pendanaan dan pelaksanaan pembangunan wisata. Wujudnya partisipasinya dapat berupa bantuan tenaga, uang dan material. Pencarian dana dilakukan dalam bentuk pengajuan dan pengawalan proposal ke berbagai instansi pemerintah. Keterbatasan kemampuan dan jaringan yang dimiliki masyarakat Kalibiru membuat proses pencarian dana ditangani oleh pendamping. Beberapa bantuan pendanaan dari pemerintah melalui program *community development* dan PNPM diperoleh tahun 2008, 2012 dan 2013 dengan total dana sekitar Rp. 615.000.000. Dana tersebut dikelola secara swakelola dan digunakan untuk pembangunan sarana dan fasilitas wisata seperti pembangunan jalan, gasebo, gardu pandang, fasilitas spot foto, aula, *homestay* dan beberapa fasilitas dasar lainnya. Pelaksanaan

pembangunan dilakukan secara swadaya gotong royong yang melibatkan tenaga kerja dari anggota HKM. Potensi tenaga buruh bangunan di Kalibiru cukup tersedia dengan adanya 19% KK memiliki profesi tersebut (Kaharuddin & Satyawan, 2016). Keterlibatan unsur *non* anggota HKM masih terbatas pada tokoh pemuda yang direkrut tahun 2010 untuk membantu pengelolaan wisata. Keterlibatan anggota HKM tidak hanya terbatas tenaga tetapi juga berupa uang. Gaji yang diterima oleh mereka yang terlibat dalam proyek pembangunan tidak dibayarkan penuh, tetapi dipotong (sesuai kesepakatan bersama), hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang terlibat lebih banyak dan dukungan bertambah. Selain partisipasi tenaga, masyarakat juga memiliki usaha warung, usaha parkir, *homestay* dan usaha lainnya, yang pembiayaannya, tenaga dan material ditanggung sendiri. Beberapa pemilik warung dan *homestay* pada periode perintisan mendapat bantuan dana dari HKM sebagai stimulan untuk berpartisipasi. Model pembangunan ekowisata yang berskala kecil, tidak padat modal, dan pelaksanaan secara gotong royong membuka ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat lokal dan menghindarkan masyarakat dari ancaman marginalisasi pembangunan pariwisata (Damanik 2013).

Pembangunan obyek wisata terus dilakukan hingga periode ke-3 (2014-2018), namun pola partisipasi masyarakat berbeda dengan periode sebelumnya. Seiring peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan, pelaksanaan pembangunan wisata dilakukan melalui pembiayaan mandiri. Pelaksanaan pembangunan wisata model kerja bakti atau gotong royong tidak memungkinkan karena kebutuhan tenaga kerja meningkat untuk menjadi karyawan atau membuka usaha. Proses pembangunan lebih mengandalkan sewa tenaga profesional, sementara monitoring pelaksanaan pembangunan ditangani pengurus HKM. Masyarakat Kalibiru yang terlibat dalam pembangunan sarana fisik berupa buruh harian, umumnya berasal dari golongan orang tua, sementara pembangunan fasilitas permainan dan atraksi ditangani oleh tenaga profesional dari Yogyakarta. Jenis fasilitas wisata yang sudah dibangun hingga tahun 2018 berupa spot foto 8 buah, permainan 2 buah, taman bunga, pondok penginapan, gardu pandang, aula, kantor

HKm, kantor pengelola wisata, pos keamanan, POS travel, warung, *shelter*, musholla dan toilet. Fasilitas parkir dibangun di luar kawasan dan disediakan secara mandiri oleh masyarakat. Selain itu, obyek wisata Kalibiru juga menyediakan layanan marshal (pengatur lalu lintas), mobil *rescue*, ATM dan wifi gratis (Anonim 2018).

Partisipasi level pemanfaatan

Partisipasi level pemanfaatan terkait dengan bagaimana anggota masyarakat mendapatkan hasil dalam pengelolaan wisata dalam bentuk pemanfaatan peluang kerja dan usaha. Pemanfaatan wisata oleh masyarakat mulai ada pada periode ke-2 dalam bentuk usaha warung dan *homestay* yang dimiliki oleh anggota HKm dan perekrutan karyawan sebanyak 7 pemuda. Pemanfaatan wisata paling banyak pada periode ke-3 (2014-2018) berupa perekrutan karyawan, tenaga pengatur lalu lintas (istilah setempat disebut marshal), buruh bangunan, usaha warung, jasa foto, usaha parkir dan ojek. Jumlah total masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata hingga tahun 2018 sebanyak 247 orang meliputi pemanfaatan peluang kerja 59% dan usaha 41%. Masyarakat yang memanfaatkan peluang usaha dalam kawasan wisata adalah anggota HKm yang secara ekonomi lebih mampu untuk memodali usahanya. Hal ini sejalan dengan Damanik (2013) bahwa sekitar 58% masyarakat yang terlibat sebagai pengelola usaha di kawasan wisata memodali usahanya dengan dana sendiri. Berdasarkan umur dan jenis kelamin, masyarakat yang terlibat sebagai karyawan 57% berumur 21-40 tahun yang didominasi oleh laki-laki (94%). Tabel 1 menunjukkan jumlah keterlibatan masyarakat dalam ekowisata Kalibiru. Pelaku wisata laki-laki juga banyak menempati pekerjaan pengatur lalu lintas (marshal), jasa foto, parkir dan ojek. Jasa foto dan ojek umumnya digemari oleh kalangan anak muda. Perempuan banyak terserap pada usaha warung, sementara pekerja/buruh bangunan relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1. Keterlibatan masyarakat dalam ekowisata
Tabel 1. Community involvement in ecotourism

No	Keterlibatan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Karyawan tetap	71	28,8
2	Pekerja Bangunan	46	18,6
3	Marshal (pengatur lalu lintas)	28	11,3
4	Usaha Warung	49	19,8
5	Usaha Ojek	20	8,1
6	Usaha Jasa Foto	17	6,9
7	Usaha Parkir	16	6,5
Jumlah		247	100

Sumber: Parjan (2018)

Source: Parjan (2018)

Masyarakat yang terlibat sebagai pengelola wisata 85% dari warga Kalibiru dan sisanya dari dusun sekitarnya. Masyarakat luar Kalibiru yang terlibat dalam pengelolaan wisata adalah mereka yang memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu yang belum banyak dimiliki oleh warga Kalibiru seperti fotografer, komputer, dan komunikasi (Kaharuddin & Satyawan 2016; Anonim 2018). Ekowisata Kalibiru juga melibatkan perempuan sebanyak 37% perempuan untuk memanfaatkan peluang kerja dan usaha. Peran ekowisata dalam perspektif gender juga digambarkan Tran dan Pierre (2014) bahwa ekowisata mampu menciptakan pembagian kerja yang adil bagi perempuan, peningkatan pendapatan, kepercayaan diri dan adopsi peran kepemimpinan perempuan di arena politik lokal. Kondisi tersebut berbeda dengan struktur masyarakat pedesaan pada umumnya golongan usia tua dan laki-laki menduduki peran dan status sosial yang tinggi dibandingkan dengan perempuan (Raharjo 2014). Anggota HKm yang terlibat dalam pemanfaatan wisata hanya 23% dari total anggota HKm, hal ini disebabkan adanya beberapa anggota HKm merasa tidak cocok dengan kerja di wisata dan memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk terlibat. Jumlah anggota HKm dan keluarganya yang terlibat dalam pemanfaatan wisata sebanyak 46% dari total anggota HKm (Kaharuddin 2016; Anonim 2018).

Tabel 2. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata Kalibiru
Tabel 2. Community participation in Kalibiru ecotourism development

Partisipasi	Perkembangan Ekowisata	Mulai berkembang	Berkembang
	Perintisan 2007-2009	2010-2013	2014-2018
Perencanaan (Ide, sosialisasi, penyusunan rencana)	Pendamping, pengurus HKM	Pendamping, pengurus HKM	Pengurus HKM dan Pengelola wisata
Pelaksanaan (pencarian dana dan pembanguan)	Pendamping, anggota HKM	Pendamping, anggota HKM	Tenaga profesional, Pengurus HKM
Pemanfaatan (Peluang kerja dan usaha)	-	Anggota HKM secara terbatas dan tokoh pemuda	Anggota HKM, masyarakat non anggota HKM

Manfaat yang diterima masyarakat dalam memanfaatkan peluang kerja dan usaha berupa pendapatan karyawan rata-rata perbulan tahun 2018 sebesar Rp. 2.500.000. Jumlah tersebut jauh diatas UMP Propinsi DIY (Rp. 1.454.154,15) dan UMK Kab. Kulonprogo (Rp. 1.493.250) tahun 2018 (Tribun Yoga, 2 Januari 2018). Manfaat juga dirasakan oleh seluruh anggota HKM dalam bentuk pemberian dana setiap 4 bulan sekali sebesar Rp. 200.000 – Rp. 400.000/anggota (tergantung kondisi keuangan HKM). Pemberian dana tersebut dimaknai dalam 3 hal yaitu (1) sebagai uang pengganti kelola tanaman semusim; (2) anggota HKM sebagai pemegang saham usaha wisata sehingga berhak mendapatkan bagi hasil; dan (3) sebagai dana pengamanan kawasan hutan khususnya andil masing-masing. Secara umum masyarakat yang tingkat keterlibatannya tinggi, modal dan *skills* memperoleh nilai manfaat yang lebih besar baik berupa gaji, posisi dalam lembaga, dan kesempatan berusaha. Kondisi tersebut sesuai dengan temuan Setiawan et al. (2017) bahwa masyarakat yang memiliki modal, akses keuangan dan keterampilan memiliki kemampuan berpartisipasi dengan baik pengelolaan ekowisata.

Manfaat juga dirasakan oleh seluruh warga Kalibiru melalui program bantuan bedah rumah, santunan kepada jompo dan tunjangan hari raya, perbaikan fasilitas sarana di kampung seperti perbaikan jalan, renovasi masjid, pembangunan gedung TK dan renovasi pagar makam. Manfaat ekowisata juga dirasakan oleh warga dusun sekitar dalam bentuk bantuan masjid, perbaikan jalan, bantuan pembangunan obyek wisata di komunitas HKM Kulonprogo. Adapun partisipasi masyarakat

dalam pengembangan ekowisata Kalibiru secara umum disajikan dalam Tabel 2.

Peran lembaga HKM dan pihak lain dalam mendorong partisipasi masyarakat

Perubahan sikap masyarakat khususnya anggota HKM Mandiri yang semula kurang mendukung pengembangan ekowisata berubah menjadi pelaku wisata, tidak lepas dari peran pendamping, pemerintah, pemimpin lokal dan aturan lembaga HKM. Peran pendamping dari lembaga LSM dan perorangan dalam menghadirkan beberapa kegiatan proyek pembangunan wisata dengan dana yang cukup besar, telah merubah sikap masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wisata. Pendanaan pembangunan wisata dari pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan banyak warga, menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan wisata. Mereka menyadari peluang ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang awalnya dinilai tidak potensial dikembangkan. Masyarakat juga menganggap bahwa nilai manfaat akan lebih besar didapatkan sekiranya kita mampu mengelola ekowisata secara mandiri. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Damanik (2013) bahwa masyarakat pelaku wisata di Indonesia masih melihat wisata dari sisi ekonomi dibandingkan aspek pendidikan dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal.

Peran pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan dalam mendukung pengembangan wisata sangat besar terutama terkait dukungan program pendanaan dan kegiatan sehingga proses perintisan, pembangunan dan promosi ekowisata berjalan

dengan baik. Disisi lain belum adanya kebijakan di Kementerian Kehutanan yang mengatur tentang pembagian hasil dari pengelolaan wisata yang dilakukan HKm, menjadikan pendapatan ekowisata Kalibiru sepenuhnya digunakan untuk pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya pendapatan yang diterima karyawan wisata jauh di atas upah minimum kabupaten (UMK) menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Selain pihak eksternal, pihak internal juga berperan dalam mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata. Mereka berasal dari tokoh-tokoh pemimpin lokal khususnya Pengurus HKm dan pengelola wisata yang dikenal dengan *founding father* wisata. Mereka dapat diterima dan didengarkan oleh sebagian besar warga Kalibiru dan mampu memilih dan menempatkan orang-orang yang pada posisi tepat. Mereka mampu merangkul warga masyarakat dari berbagai latar belakang seperti golongan yang terpinggirkan, mereka yang secara sosial ekonomi terbatas, pengangguran, golongan yang berpotensi menjadi hambatan. Golongan tersebut berusaha dilibatkan dalam pengelolaan wisata sesuai potensi dan kapasitas yang dimiliki. Tokoh-tokoh lokal tersebut juga memiliki *power* dalam penentuan perekrutan karyawan.

Lembaga HKm juga memiliki peran besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Kelembagaan menjadi kekuatan penting dan penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat (Damanik 2013; Soetomo 2015). Peran lembaga HKm Mandiri dalam mendorong partisipasi masyarakat ditentukan oleh visi dan aturan main yang telah disusun.

Visi pengelolaan ekowisata HKm Mandiri yang menginginkan manfaat yang besar terutama kepada anggota HKm dan masyarakat Kalibiru. Visi tersebut meskipun tidak tertulis tapi diimplementasikan dalam aturan internal HKm yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata. Aturan tersebut menyangkut perekrutan karyawan, pengembangan atraksi wisata, dan kebijakan administrasi lembaga.

1. Aturan perekrutan karyawan dan pelaku usaha wisata yang memprioritaskan anggota HKm, anggota keluarga HKm, warga Dusun

Kalibiru, yang memiliki kapasitas, peran dalam proses pembangunan ekowisata, integritas dan kemampuan mengayomi. Apabila anggota HKm tidak bisa terlibat, maka dicari anggota keluarganya yang memungkinkan terlibat, sehingga keberadaan wisata bisa dirasakan oleh anggota HKm. Pengurus HKm dan pengelola wisata juga menjadikan anggota HKm sebagai pemilik saham di wisata sehingga berhak mendapatkan manfaat. Kebijakan internal tersebut mampu mencegah masuknya pemilik modal dari luar untuk terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Meskipun demikian, seiring perkembangan wisatawan dan pendapatan yang mulai menurun pada tahun 2018, HKm mencoba menggandeng pihak ketiga dalam pengembangan atraksi (seperti *event organizer* lomba balap sepeda Gunung di Kalibiru). Pihak HKm mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat Kalibiru dalam penyelenggaraan event tersebut. Masyarakat yang terlibat dalam event tersebut adalah mereka yang lahannya atau pekarangannya dilalui jalur sepeda.

2. Kebijakan lembaga HKm yang berorientasi pada pengembangan atraksi rekreatif membuka ruang bagi masyarakat non anggota HKm untuk berpartisipasi khususnya kalangan anak muda. Keterlibatan pemuda dalam pengelolaan wisata mampu mewujudkan pengelolaan yang inovatif dan adaptif. Disisi lain, kebijakan tersebut membatasi anggota HKm untuk berpartisipasi karena keterbatasan modal dan keterampilan. Kondisi tersebut menghasilkan kebijakan jalan tengah dengan memprioritaskan anggota keluarga HKm dan warga Kalibiru dalam perekrutan karyawan.
3. Pemisahan antara manajemen administrasi HKm dengan seksi usaha wisata, juga memperluas ruang partisipasi masyarakat. Lembaga HKm bertanggung jawab terhadap perencanaan program dan pelaksanaan pengembangan wisata, sementara organisasi pengelola wisata lebih fokus kepada penyelenggaraan operasional harian wisata. Kondisi tersebut membuat lembaga HKm dapat mengakomodir anggotanya yang tidak terlibat dalam memanfaatkan peluang kerja dan

usaha, seperti menjadi pengawas pembangunan fasilitas wisata.

Kesimpulan

Kasus pengembangan ekowisata Kalibiru yang berbasis hutan kemasyarakatan (HKm) memberikan beberapa pembelajaran yang terkait dengan warna HKm dan kapasitas masyarakat kelompok tani. Pengelolaan HKm berbasis jasa ekowisata merupakan warna baru HKm dimana selama ini HKm banyak dipraktekkan untuk kelola lahan dan hasil hutan non kayu. Disisi lain memberikan pembelajaran atas kemampuan masyarakat kelompok tani mengembangkan wisata yang mana umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat pemilik modal, akses dan keterampilan. Kapasitas masyarakat HKm tersebut terkonfirmasi pada besarnya partisipasi pada level perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan selama periode perkembangan obyek wisata Kalibiru. Partisipasi masyarakat sangat besar terjadi pada level pemanfaatan yang tidak hanya melibatkan anggota HKm tetapi juga masyarakat non anggota HKm. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat merespon kebutuhan wisatawan dengan menyediakan layanan yang baik, sekaligus masyarakat memandang ekowisata sebagai peluang meraih keuntungan ekonomi. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut tidak lepas dari peran pendamping, pemerintah dan aturan lembaga HKm dalam fasilitasi dan penyediaan ruang akses bagi masyarakat lokal.

Meskipun anggota HKm dan keluarganya cukup terakomodir dalam pengelolaan ekowisata, kiranya perlu dikembangkan atraksi ekowisata berbasis otentisitas yang mendorong pengayaan pengalaman dan pembelajaran nilai-nilai dan keunikan HKm Kalibiru. Model pengembangan atraksi wisata rekreatif (foto selfi) yang selama ini dikembangkan memiliki beberapa kelemahan diantaranya mudah direplikasi, tipe wisatawannya mudah berubah, dan jauh berbeda dengan langgam kerja petani HKm Kalibiru selaku pemilik hak kelola.

Daftar Pustaka

Aji GB, Rusida Y, Joko S, Andini DE, Tanjung S, Hasriani M. 2015. Sumbangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa terhadap pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Jakarta.

- Anonim 2013. Rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP) KPH Yogyakarta. Dinas Kehutanan Propinsi DIY.
- Anonim 2016. Daftar penerimaan hasil keuntungan wisata alam Kalibiru, 1 Juni 2016.
- Anonim 2017. Capaian sektor pariwisata, 3 tahun Jokowi-JK. Kementerian Pariwisata.
- Anonim 2018. Laporan pendapatan wisata alam Kalibiru. Kokap, Kulon Progo. Yogyakarta.
- Blackstock K. 2005. A critical look at community based tourism. *Community Development Journal* 40 (1): 39-49
- Butler RW. 2011. *Tourism Area Life Cycle*. Goodfellow Publishers Ltd
- Cobbinah PB. 2015. Contextualising the meaning of ecotourism. *Tourism Management Perspectives* 16: 179-189
- Cruz REH, Eduardo BB, Guillermo MG, Erin IJEL, El Colegio FS. 2005. Social Adaptation ecotourism in the Lacandon Forest. *Annals of Tourism Research* 32(3): 610-627.
- Damanik J. 2013. *Pariwisata Indonesia: antara peluang dan tantangan*. Pustaka Palajar, Yogyakarta.
- Dogra R, Anil G. 2012. Barriers to community participation in tourism development: Empirical evidence from a rural destination. *SAJTH (South Asian Journal of Tourism and Heritage)* 5 (1): 102-124.
- Idajati H, Adjie P, Vely K. 2016. The level of participation in mangrove ecotourism development, Wonorejo Surabaya. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 227: 515 - 520
- Kaharuddin, Satyawan P. 2016. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata alam di hutan lindung Kalibiru Kulonprogo. Laporan DPP Fakultas Kehutanan UGM.
- Lund JF. 2015. Paradoxec of Paticipation: The logic of professionalizationin participatory forestry. *Forest Policy and Economics* 60:1-6. DOI: 10.1016/j.forpol.2015.07.009
- Maryudi A, Rosan RD, Carsten S, Cornelius Y, Manjola S, Helene A, Ratchananth R, Max K. 2012. Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics* 14: 1-5
- Maryudi A, Krott M. 2012. Local Struggle for Accessing State Forest Property in a Montane Forest Village in Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Development* 5(7):62-68.
- Maryudi A, Nawir AA. 2017. *Hutan Rakyat di Simpang Jalan*. UGM Press, Yogyakarta.
- Maryudi A. 2014. An Innovative Policy For Rural Development? Rethinking Barriers to Rural Communities Earning Their Living from Forests in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan* 8(1): 50-64 .
- Maryudi A. 2017. Creating New Forest Governance Structure for the 12.7 Million-Promise. *Jurnal Ilmu Kehutanan* 11 (1): 1-3
- McKercher, B. 2005. Destinations as Products? A Reflection

- on Butler's Life cycle. *Tourism Recreation Research* 30(3): 97-102
- Moscardo G, Elena K, Laurie M, Nancy GM, Andrea S, 2017. Linking tourism to social capital in destination communities. *Journal of Destination Marketing & Management* 6: 286-295.
- Nasikun. 2000. Globalisasi dan paradigma baru pembangunan pariwisata berbasis komunitas. Dalam Fandeli (editor). *Pengusahaan Ekowisata*. Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.
- Parjan. 2018. Pengelolaan hutan kemasyarakatan Kabupaten Kulon Progo:Kelompok Tani HKM Mandiri Kalibiru. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pemanduan Ekowisata di KKPH Tangkoko, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara.
- Prabhakarana S, Vikneswaran N, Sridar R. 2014. Community participation in rural tourism: Towards a conceptual framework. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 144: 290 - 295
- Purba J. 2005. Pengelolaan lingkungan sosial. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ratman DR. 2016. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019. Makalah disampaikan dalam rapat Koordinasi Nasional KementerianPariwisata. "AkselerasiPembangunan Kepariwisataan dalam rangka Pencapaian Target Wisman dan Wisnus 2016". Jakarta, 27 Januari 2016
- Setiawan B, R. Rijanta, M. Baiquni. 2017. Sustainable Tourism Development: the Adaptation and Resilience of the Rural Communities in (the Tourist Villages of) Karimunjawa, Central Java. *Forum Geograpi* 31, 232-245.
- Shier, H. 2001. Pathways to participation; Openings, opportunities and obligations. A new model for enhancing children's participation in decision making, inline with article 12.1. of the United Nation Convention on the right of the child. *Children & Society* 15, 107 - 117.
- Sikor T, Gritten D, Atkinson J, Huy B, Dahal GR, Duangsathaporn K, Hurahura F, Phanvilay K, Maryudi A, Pulhin J, Ramirez MA, Win S, Toh S, Vaz J, Sokchea T, Marona S, Yaqiao Z. 2013. *Community forestry in Asia and the Pacific: Pathway to inclusive development*. RECOFTC, Bangkok.
- Slamet, Y. 1989. Konsep-konsep dasar partisipasi sosial. PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta.
- Tosun C. 2000. Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management* 21: 613-633
- Tran L, Pierre W. 2014. Ecotourism, gender and development in Northern Vietnam. *Annals of Tourism Research* 44: 116-130
- Tribun Yogya, 2018. UMP dan UMK Yogyakarta 2019, mulai Kota Jogja, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo dan Sleman. Selasa, 30 Oktober 2018.
- Wiratno, 2017. Kalibiru yang mendunia. Konservasiwiratno.blogspot.com
- Wood, M.E. 2002. Ecotourism: principles, practices and policies for sustainability. UNEP Publication.
- Yin RK. 2015. Studi kasus: Desain dan metode (terjemahan). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.